

BAB I

MAKNA REFORMASI DI INDONESIA

Reformasi di Indonesia telah bergulir. Sejak munculnya istilah ini pertama kali ketika Dr. Sri Bintang Pamungkas mengungkapkan gagasannya secara terbuka,¹ sampai saat ini reformasi itu sendiri “didengungkan” dan terkadang dijadikan *senjata pamungkas*² dalam menyikapi gagasan “seseorang”³ menanggapi “lawannya.”⁴ Memang istilah sebelumnya sudah dikenal terutama oleh kalangan gereja dan kekristenan. Tetapi untuk mengaitkan dan membawa istilah ini ke dalam wacana perpolitikan konteks Indonesia belum pernah dilakukan, termasuk oleh gereja dan kekristenan itu sendiri.

Mengingat “muatan makna” yang dikandung istilah “reformasi” maka secara otomatis, hampir semua *lini* kehidupan dan oleh semua orang telah melakoninya. Tetapi untuk menyadarinya terjadi kemacetan, mengingat bahwa *terminus* reformasi itu sendiri tidak dipahami semua orang. Paling tidak setiap individu telah dan sedang melakukannya. Seluk beluk reformasi di Indonesia dapat dipahami seperti berikut ini.

¹ Ide *reformasi* pertama kali dilontarkan Dr. Sri Bintang Pamungkas dalam upacara deklarasi pembentukan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) tanggal 26 Mei 1996. Sebagai bukti keberaniannya menentang Soeharto dan rezim Orba, saat itu juga diproklamasikan Dr. Sri Bintang Pamungkas sebagai calon Presiden dan Julius Usman sebagai calon Wakil Presiden untuk periode 1998-2003. Ada enam alasan proklamasi tersebut: 1. Sebagai tantangan terhadap Presiden Soeharto. 2. Untuk menghentikan kepemimpinan Soeharto. 3. Untuk memulai reformasi yang mendasar dan menyeluruh sifatnya. 4. Mengembalikan pola dwi-tunggal dan menolak kebiasaan calon tunggal model Orba. 5. Menantang keberanian dari calon-calon lain dari berbagai partai. 6. Mendidik rakyat agar tidak takut terhadap rezim yang berkuasa sekalipun rezim itu absolut, represif dan otoriter. Lihat dalam Dr. Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (Jakarta: Erlangga, 2001) h. x, 7.

² Bukan nama orang. *Pamungkas* artinya adalah penghancur, *Senjata Pamungkas* adalah senjata penghancur. Lihat dalam Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1966) h. 1104.

³ “Seseorang” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah setiap warga negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang membicarakan dan menanggapi “reformasi.”

⁴ “lawannya” dapat dibaca sebagai bentuk komunikasi di luar diri seseorang, bisa lawan politik, bisa juga lawan berdebat, bisa juga lawan menangkap ikan, dan lain sebagainya.

1.1 Definisi

Reformasi dapat dipahami sebagai perubahan radikal untuk perbaikan (di bidang sosial, politik dan agama), sedangkan *reformis* adalah orang yang menganjurkan adanya perbaikan (usaha di bidang sosial, politik, dan agama) tanpa kekerasan.⁵ Sedangkan menurut Ruddy Kaharuddin dalam tulisannya “Keajaiban Mahasiswa”⁶ mengatakan bahwa reformasi adalah sebuah keinginan yang kuat disertai dengan aksi konkret untuk menciptakan sebuah perubahan substantif dan esensial ke arah yang lebih baik. Sementara itu Frans M. Parera dan Jakob Koekerits mengatakan bahwa reformasi total adalah reformasi dalam aspek-aspek sosial, politik, pendidikan, hubungan antar golongan, kesenian, kehidupan beragama dengan membangun konsepsi yang baru tentang kekuasaan yang relevan dengan semangat dasar gerakan sipil internasional dewasa ini.⁷

Dari berbagai definisi di atas dapat dilihat bahwa reformasi itu sendiri diartikan pemakaiannya secara luas. Dari makna perubahan sosial, politik dan agama lambat laun bergeser dan berkembang pemakaiannya ke aspek-aspek yang lebih luas, sehingga mencakup ekonomi, pendidikan, budaya, dan kehidupan bernegara.

Pendefinisian yang semakin luas memperlihatkan bahwa warga negara NKRI menginginkan adanya pembaharuan. Terlepas dari radikal, berkesinambungan atau perlahan, yang jelas pembaharuan sangat dibutuhkan. Gaung “pembaharuan” bergema di mana-mana. Tak ayal, semua lini kehidupan sosial pun dianggap butuh reformasi. Sehingga tidak heran muncul pembakaran buku-buku yang dianggap Marxis, karena

⁵ M.Dahlan Yakub Al-Barry, *Kamus Sosiologi Antropologi* (Surabaya: Indah, 2000) h. 274.

⁶ Frans M. Parera & T. Jakob Koekerits (penyunting), *Reformasi Kehidupan Bernegara* (Jakarta, Kompas, 1999) h. 5.

⁷ *ibid*, h.xxxv

dianggap dalam hal itupun butuh reformasi.⁸ Satu hal yang jelas, kehidupan bernegara perlu direformasi. Kesimpangsiuran dan tarik menarik pendapat dalam mewujudkan reformasi itu sendiri, ada tiga sikap yang muncul ke permukaan sebagai opsi menyikapi reformasi, yaitu:

1. *Kubu yang pro status quo (kubu establishment)*. Kubu ini didukung oleh pelaku-pelaku ketatanegaraan yang masih ada yaitu hasil rezim Orba (baca: Soeharto). Sering disebut kubu konservatif, dengan keinginan untuk melanggengkan serta melestarikan struktur dan pola ketatanegaraan yang sudah ada sesuai dengan sistem lama.
2. *Kubu yang berseberangan dengan status quo*. Kubu ini boleh dikatakan kubu yang ekstrim sehingga dalam pendapatnya harus merombak keseluruhan pola dan struktur ketatanegaraan yang ada. Alasannya, ketatanegaraan yang ada sekarang adalah warisan masa lalu sehingga berisi kebobrokan dan kebusukan kekuasaan yang selama ini memerintah dan mengurusnya. Kubu ini berjuang untuk sebuah reformasi ketatanegaraan yang baru, yang total berubah sama sekali sesuai dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.
3. *Kubu moderat*. Kubu ini memandang dan mencita-citakan sebuah ketatanegaraan Indonesia ke depan, sebagai sebuah kontinuitas dari proses perkembangan yang sudah dijalankan selama ini, kecuali kehadiran militer dalam pemerintahan sipil. Oleh karena itu menerima bahwa *fundamen* ketatanegaraan tidak perlu direkonstruksi ulang. Rekonstruksi hanya pada suprastruktur yakni lembaga-lembaga tinggi negara, agar mengurangi intervensi dan menumpuknya kekuasaan pada tangan satu orang.

⁸ Kompas, 13 Juni 2001, h. 1

Ketiga kubu di atas saling memperlihatkan kekuatannya pada aras politik di *legislatif* maupun di *eksekutif* serta di *yudikatif*. Baik secara langsung maupun tidak langsung, masing-masing pihak mempertahankan eksistensi dan arah politiknya. Sesuai dengan aspirasi dan gerakan mahasiswa menumbangkan Orba maka kalangan mahasiswa lebih menginginkan kubu yang menolak status *quo*. Dari kalangan Orba, baik itu dari Partai Golkar maupun pejabat-pejabat yang sampai kini masih ikut di dalam penyelenggaraan negara, lebih menginginkan status *quo*. Dan di luar kedua bentuk di atas, masuk di dalam kelompok moderat, termasuk di dalamnya penulis sendiri.

Faktor yang mempengaruhi sehingga istilah reformasi mencuat ke permukaan adalah ketika Orde Baru (*Orba*)⁹ yang berkuasa selama tigapuluhdua tahun melakukan kesalahan-kesalahan besar dan fatal. Untuk dapat melihat mencuatnya istilah reformasi, berikut hal-hal yang mempengaruhinya.

1.2 Orde Baru, Pemerintahan dan Kepemimpinannya

Orde Baru dimulai ketika Soeharto –waktu itu masih berpangkat Mayor Jenderal TNI- selaku pengemban Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), menjabat Presiden.¹⁰ Setelah sidang umum MPRS yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution maka diberi mandat dan wewenang kepada pengemban Supersemar menjadi Pejabat Presiden NKRI.¹¹ Setelah Pemilu 1971 secara resmi Golkar yang memenangkan Pemilu pada waktu itu mencalonkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden NKRI kedua.

⁹ untuk singkatan Orde Baru dalam penulisan-penulisan berikut menggunakan: Orba.

¹⁰ Bibit Suprpto, Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h. 322

¹¹ *ibid.*, h. 321.

Tumbangnya babak kepresidenan Ir. Soekarno maka secara otomatis dimulainya babak baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Untuk membedakan pemerintahan sebelumnya, Soeharto manamai kabinetnya dengan kabinet Pembangunan. Masa ini sekaligus juga ditandai dengan berdirinya Orde yang baru yang disebut dengan Orde Baru (Orba). Istilah Orde Lama (Orla) muncul karena penamaan oleh Orba dengan maksud untuk membedakan pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa Soekarno.

Pemerintahan Orba dipimpin oleh Soeharto dengan pengukuhan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 Tentang pembentukan kabinet kepada pengembalian Supersemar, dan paralel dengan pengangkatan Letnan Jenderal Soeharto, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang pencabutan kekuasaan negara dari Ir. Soekarno. Setelah dipilih pada tahun 1971, Soeharto membentuk dan menamai kabinetnya dengan sebutan kabinet Pembangunan. Kabinet yang baru ini merupakan kelanjutan Kabinet Ampera pada masa Soeharto sebagai Pejabat Presiden (25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967) melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966.

Selama tigapuluhdua tahun kekuasaannya dicanangkan beberapa gagasan pokok untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan mencanangkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP), baik yang pertama maupun yang kedua.

Tiga hal semasa kepemimpinan Soeharto yang sekaligus juga menjadi ciri khas Orde baru: *Pertama*, absolutisme kekuasaan eksekutif. *Kedua*, sentralisme kekuasaan. Dan yang *ketiga* adalah militerisme. Selama kekuasaannya, dikembangkan suatu model pembagian kelas-kelas warga negara. Sehingga kembali suasana masyarakat terkotak-kotak dalam kelas-kelas seperti yang dilakukan pemerintahan penjajahan Belanda. Semangat *ultranasional* ditumbuhkan dalam struktur selama Orba. Pengelompokan oleh

Orba: *Pertama*, golongan pribumi (termasuk minoritas Arab, dan India). *Kedua*, nonpribumi, menurut opini publik adalah etnis Tionghoa (Cina). Golongan nonpribumi hanya diperkenankan bergerak dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik dan ketatanegaraan kehadiran golongan nonpribumi tidak diperkenankan.

Dalam pemerintahan Orba semasa Soeharto menjadi Presiden, NKRI mulai mengalami kemajuan bahkan tingkat kesejahteraan mulai membaik. Tetapi menjelang tigapuluhdua tahun kepemimpinannya, tepatnya pada awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II) tahun 1997, NKRI mulai dilanda krisis dan sampai *lengser keprabon*, NKRI masih mengalami krisis. Berikut kronologis krisis:¹²

Tahun 1997

- 8 Juli : Awal krisis ekonomi moneter. Nilai rupiah terhadap dollar mulai merosot.
- 6 Oktober : Kurs dollar mencapai Rp. 3.845 setiap dollar AS.
- 31 Oktober : IMF umumkan paket bantuan keuangan senilai 23 milyar dollar AS.
- 1 November : Pemerintah melikuidasi 16 Bank.
- 10 November :
- Presiden memanggil lima menteri dan Gubernur BI untuk membicarakan mengatasi gejolak moneter.
 - Menkeu Mar'ie Muhammad jelaskan keterangan pemerintah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di DPR.

Tahun 1998:

- 6 Januari :
- Pemerintah menyampaikan RAPBN 1998/1999 yang dinilai masyarakat berat, rawan dan penuh risiko dengan kurs dollar Rp. 4000 per dollar.
 - Presiden menyatakan "badai pasti berlalu"
 - Aksi-aksi mahasiswa terus berlangsung.
 - Harga barang kebutuhan pokok terus naik, tak menentu.

¹² Kompas, Selasa 19 Mei 1998, h. 1.

- 9 Januari : Masyarakat memborong bahan pokok di pasar swalayan dan pasar-pasar tradisional.
- 16 Januari : Presiden Soeharto tanda tangani kesepakatan dengan Direktur Pelaksana IMF, Michael Camdessus.
- 10 Maret : Presiden Soeharto terpilih sebagai Presiden RI 1998-2003 untuk ketujuh kalinya.
- 11 Maret : Presiden ucapkan sumpah jabatan. "Lima tahun nanti saya akan sampaikan pertanggungjawaban" katanya.
- 13 Maret : Pangab peringatkan aksi mahasiswa jangan anarkis dan destruktif.
- 14 Maret : Susunan Kabinet Pembangunan VII diumumkan. Aksi mahasiswa terus berlangsung dan terjadi bentrokan dengan aparat.
- 23 Maret : Bentrokan di Universitas Sebelas Maret Solo. Sebanyak duapuluhlima orang mahasiswa luka.
- 24 Maret : Mahasiswa datang ke Komnas HAM memprotes kekerasan yang dilakukan aparat terhadap aksi-aksi mereka.
- 3 April : Insiden Yogyakarta. Petugas bertindak tegas menghadapi aksi unjuk rasa di UGM.
- 5 April : Mendikbud Wardiman melarang aksi di kampus.
- 11 April : Pangab berdialog dengan tigapuluhdua organisasi kepemudaan.
- 15 April : Mahasiswa seJabotabek, lebih dari tigapuluh kampus mengadakan aksi serentak yang diikuti ribuan mahasiswa.
- 17 April : Presiden menyatakan aksi mahasiswa jangan mengganggu proses belajar mengajar.
- 18 April : Pemerintah, sejumlah Menteri dan Pangab melakukan dialog dengan sejumlah mahasiswa dan tokoh masyarakat di PRJ Kemayoran.
- 1 Mei : Presiden mengatakan bahwa reformasi politik baru bisa dimulai tahun 2003 ke atas, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati.
- 2 Mei : Menpen dan Mendagri menjelaskan kembali soal reformasi tahun 2003. "Presiden justru menyampaikan langkah yang jelas untuk

reformasi yang kontitusional,” katanya. Aksi keprihatinan di berbagai kampus melibatkan puluhan perguruan tinggi dan ribuan mahasiswa. Insiden berdarah terjadi di IKIP Jakarta, tigapuluhtiga mahasiswa luka serius dan puluhan cedera.

- 4 Mei : Pemerintah menaikkan harga BBM dan listrik. DPR menolak. Harga-harga terus membubung. Kerusuhan terjadi selama tiga hari di Medan dan sekitarnya, enam orang tewas.
- 8 Mei : Moses Gatotkaca tewas dengan kepala luka dalam unjuk rasa di UGM Yogyakarta.
- 9 Mei : Presiden berangkat ke KTT G-15 di Kairo Mesir. Presiden yakin stabilitas politik dan nasional terpelihara. Lettu Anumerta Polisi Dadang Rusmana dari Polres Bogor tewas saat bertugas memantau aksi unjuk rasa di Bogor.
- 12 Mei : Lima mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti Jakarta.
- 13 Mei : Di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo, Presiden menyatakan jika rakyat sudah tidak menghendaki, ya silahkan. Dia tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan senjata. Masyarakat berkabung atas gugurnya mahasiswa “pahlawan reformasi.” Jakarta mulai dilanda kerusuhan massa. Rupiah melorot terhadap dollar sampai Rp. 11.500,-
- 14 Mei : Jakarta, Tangerang, Bekasi serta daerah lainnya rusuh. Pembakaran, perusakan dan penjarahan toko dilakukan massa.
- 15 Mei : Presiden tiba dari Kairo. Melalui Menpen Alwi Dahlan dikatakan, Presiden Soeharto tidak pernah menyatakan siap mundur. Tetapi jika masyarakat tidak percaya lagi, Presiden Soeharto akan lengser keprabon (turun tahta). Kenaikan harga BBM dan listrik direvisi.
- 16 Mei : Ketua DPR/MPR Harmoko usai bertemu Presiden Soeharto dan mengumumkan rencana Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Sejauh ini lebih dari limaratus orang tewas dalam kerusuhan di Jakarta. Kerugian fisik mencapai duakomalima triliun rupiah (2,5 triliun).
- 18 Mei :
- Pukul 09.00 WIB: Sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi maupun delegasi masyarakat mulai memasuki gedung DPR. Beberapa diantaranya diterima fraksi-fraksi.

- Pukul 11.00 WIB: Gelombang mahasiswa yang mendatangi MPR semakin banyak, dan makin siang mencapai ribuan orang. Aparat berjaga dengan simpatik. Aksi-aksi dilakukan di depan gedung DPR. Mereka menuntut segera dilakukan sidang istimewa MPR serta pencabutan mandat MPR terhadap Presiden Soeharto.
- Pukul 15.30 WIB: Ketua DPR/MPR Harmoko mengumumkan hasil rapat pimpinan DPR/MPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.
- Pukul 15.30 WIB: Mahasiswa meninggalkan gedung DPR/MPR dengan puluhan bus yang disediakan aparat keamanan.
- Pukul 20.00 WIB: Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, mengatakan bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mundur merupakan sikap dan pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif.

Dari kronologis krisis di atas, maka patut dipertanyakan pengertian masyarakat akan arti krisis tersebut. Atau dengan kata lain, seberapa jauh “krisis” dimengerti masyarakat? Dari survey yang dilakukan oleh Dr. Emmanuel Subangun, ternyata persentase yang paling tinggi dalam pemahaman serta yang dialami oleh masyarakat adalah dalam hal *sembako*. Berikut laporannya:

Dampak Krisis Yang Langsung Dirasakan

• Harga sembako langsung melambung	73.8
• Mendapatkan sembako semakin sulit	24.0
• Tindakan kriminal meningkat	28.6
• Rasa aman berkurang dan ketakutan naik	20.1
• Kehilangan pekerjaan	18.4
• Pelayanan untuk masyarakat justru membaik	6.5
• Pejabat daerah banyak didemo	5.5

Sumber: Emmanuel Subangun¹³

¹³ Lihat dalam Kaum Beragama Di Tengah Krisis Nasional (Yogyakarta: Kanisius, 1999) h. 23.

Menurut Emmanuel Subangun, total persentase lebih dari seratus menunjukkan terjadinya tingkat *high involvement* dari masyarakat atas tekanan krisis. Dengan demikian terlihat secara jelas, bahwa krisis yang dirasakan masyarakat adalah krisis sembako dan itu jelas-jelas berhubungan dengan ekonomi. Dalam posisi yang demikian, masyarakat melalui opini publik tahu kemampuan pemerintah yang tidak akan mampu menjaga agar harga pangan turun. Oleh karena itu, secara sederhana krisis diartikan oleh masyarakat ketika harga-harga pangan (sembako) naik. Dengan demikian, krisis identik dengan terancamnya kelangsungan hidup masyarakat.

1.3 Kondisi Masyarakat Indonesia

Kondisi masyarakat Indonesia tercermin dalam aspek-aspek sosial kultural yang ditampilkan. Selama Orba dan menjelang tumbangnya kekuasaan Soeharto Presiden NKRI kedua, kondisi masyarakat, bangsa dan NKRI adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kondisi Ideologi

Pada masa Orde Baru, ideologi negara adalah ideologi Pancasila (Tap MPR No. II/MPR/197). Merujuk ke belakang dalam sejarah Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara lahir pada tahun 1963, yaitu melalui Undang-Undang Antisubversi No.11/PNPS/1963 dengan kondisi komunis sangat berpengaruh.

Oleh Soeharto disempurnakan kembali dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang boleh hidup di NKRI dan menolak adanya ideologi lain, termasuk ideologi agama.

Dalam pemerintahan B.J. Habibie, UU No.11/PNPS/1963 dicabut melalui UU No. 26/1999. Tetapi ideologi negara tetap Pancasila. Dalam pemerintahan B.J. Habibie (sejak runtuhnya Orba), banyak partai berdiri dengan tidak memakai azas Pancasila tetapi memakai azas ideologi agama.

Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional difungsikan sebagai pemersatu seluruh unsur-unsur kehidupan bangsa dan sekaligus memberi legitimasi bagi sistem pemerintah yang ada. Abdurrahman Wahid mengatakan:

Indoktrinasi sebagai sebuah proses ideologisasi dilangsungkan secara besar-besaran terutama dengan menampilkan dua sisi yang saling berbeda. Di satu sisi dilakukan penggalian atas nilai-nilai luhur bangsa, yang kemudian dilekatkan kepada ideologi nasional sebagai “bukti” dari relevansi ideologi nasional itu sendiri bagi kehidupan bangsa. Di sisi yang lain, dilakukan upaya untuk melakukan teorisasi yang baku dan konseptualisasi yang menyeluruh atas cakupan-cakupan nasional itu dalam kehidupan.¹⁴

Dari pendapat Abdurrahman Wahid tersebut, dapat dilihat kondisi ideologi NKRI dalam masa Orba. Ada dua sisi yang tidak sinkron. Pada sisi yang satu, secara teoritis sosialisasi ideologi Pancasila digalakkan. Terbukti dengan adanya *Eka Prasetya Pancakarsa* yang lebih sering disebut dengan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Tetapi di sisi yang lain, mentalitas aparatur dalam prakteknya tidak mencerminkan adanya pengamalan P4 tersebut. Contoh yang paling nyata adalah dalam soal korupsi dan pungutan liar. Dari tingkat atas sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) korupsi merajalela. Jadi yang tinggal dari Pancasila itu adalah hanya sebuah “proses.” Artinya bahwa Pancasila sebagai ideologi hanya ada dalam proses untuk kiranya dapat menjadikannya berwujud atau berbentuk.

¹⁴ Frans M. Parera & T. Jacob Koekerits (penyunting), Gusdur Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: Harian Kompas, 1999) h.121.

Pancasila sebagai ideologi pada prinsipnya tidak menjadi masalah karena para pendiri Republik ini juga berjuang untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada pemerintah yang menjalankan mandat Pancasila tersebut. Selama Orba berkuasa, ideologi Pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen sesuai dengan amanat UUD '45. Oleh karena itu Abdurrahman Wahid mengatakan:

Ideologi yang luhur mulia, ternyata tidak diwujudkan dalam perilaku pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan semangat Undang-Undang Dasar, yaitu berlangsungnya pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁵

Ideologi Pancasila model Orba, *luluh lantak* saat tumbang rezim Orba. Banyak pihak menolak keberadaannya sebagai ideologi negara dan menginginkan diganti dengan ideologi agama. Hal itu terlihat ketika masa pemerintahan B.J. Habibie, banyak partai politik berdiri dengan mencantumkan azas agama pada azas partainya. Kekecewaan banyak orang diakumulasikan dengan mengesampingkan Pancasila dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus dalam masa orde reformasi ini, tidak mustahil pada suatu saat kelak, Pancasila sebagai ideologi negara runtuh, seperti runtuhnya ideologi komunisme di beberapa negara.¹⁶

1.3.2 Kondisi Politik

Politik Indonesia selama pemerintahan Orba adalah politik sentralisasi. Segala aspek kegiatan masyarakat dipantau dan pengendaliannya secara sentralisasi dari Jakarta. Golkar adalah sebagian dari rumusan politik Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan.

¹⁵ *ibid.*, h. 122.

¹⁶ Lihat dalam topik "Kematian Ideologi" yang ditulis oleh Dr. Albert Hasibuan dalam bukunya *Titik Pandang Untuk Orba* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h. 217-218.

Menurut Sunardian Wirodono, ada empat pilar politik Orba, yakni: *Pertama*, secara militeristis menekankan dwi-fungsi ABRI. *Kedua*, pengutamaan Golkar sebagai kendaraan politik dalam menguasai DPR/MPR. *Ketiga*, depolitisasi dan deideologisasi masyarakat luas dalam Pancasila. *Keempat*, menerapkan pola anggota dewan (DPR) yang dipilih dari bawah tetapi pengangkatannya dari atas. Dan selain keempat pilar tersebut dikeluarkannya paket lima Undang-Undang Politik, sangat menguntungkan pemerintah (baca: penguasa).¹⁷

Dalam ekonomi berlaku politik sentralisasi pengendalian ekonomi. Kekayaan daerah semuanya diatur dari pusat, termasuk pendistribusiannya. Selain sentralisasi ekonomi, secara politik ekonomi menganut ketergantungan akan pinjaman luar negeri. Sehingga menjadi preseden buruk ketika dalam masa krisis negara-negara donor tarik ulur dalam pemberian bantuan.

Politik kesejahteraan sosial tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 UUD '45. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial juga semakin melebar.

Politik luar negeri bebas dan aktif, tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Tetapi dengan tidak memihak juga telah membentuk Blok baru, yaitu Nonblok. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam penciptaan perdamaian dunia, antara lain dengan mengirimkan pasukan (Pasukan Garuda) untuk mendukung program PBB.

¹⁷ Lihat Gerakan Politik Indonesia (Jakarta: Puspa Swara, 1995) h. 71-87 dalam pokok judul "HKBP"

1.3.3 Kondisi Ekonomi

Menurut M.Sadli seorang pengamat ekonomi mengatakan bahwa ada hipotesis yang dianut pengamat ekonomi Indonesia, yaitu kalau keadaan ekonomi membaik yaitu karena ketiban rezeki misalnya harga minyak naik, maka kebijakan ekonomi pemerintah pasti buruk. Dengan ada “gula” maka secara otomatis ada “semut.” Begitu rezeki ekonomi mengucur, korupsi pun masuk.¹⁸ Hipotesis tersebut tidak berlaku pada jaman sebelumnya (Orde Lama 1945-1966). Karena pada masa Orla, “kue proyek” belum ada.

Oleh karena itu setelah melakukan berbagai langkah penyusunan pembangunan, Orba mencanangkan Pembangunan Lima Tahun. Dalam setiap pembangunan itu banyak proyek dikerjakan dan kalau pengawasan tidak ketat menjadikan proyek sebagai ladang korupsi. Secara khusus, tiga pilar utama ekonomi makro Orba: *Pertama*, kebijakan anggaran berimbang. *Kedua*, pembukaan ekonomi Indonesia bagi arus modal asing. Dan yang *ketiga* adalah kebijakan lalu lintas devisa bebas.¹⁹ Latar belakang pilar tersebut karena konteks ekonomi pada awal Orba memperlihatkan laju inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1966 sebesar 650 persen, pada tahun 1967 sebesar 100 persen, pada tahun 1968 sebesar limapuluh persen, dan pada tahun 1969 sebesar tigabelas persen.²⁰ Faktor lain yang melatar belakangi tiga pilar ekonomi makro tersebut, yakni terputusnya hubungan dengan lembaga-lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia dan IMF. Akan tetapi pada tahun 1974 ketiga pilar ekonomi tersebut mulai digugat yaitu dengan adanya peristiwa *malari* 1974. Dan pada pilar ketiga, krisis ekonomi menggugat keberadaan lalu lintas devisa bebas tersebut.

¹⁸ Tempo Nomor 14/XXX/4-10 Juni 2001, h.122,123.

¹⁹ Emil Salim “Seribu hari Pertama Orde Baru 1965-1968” dalam Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Kompas, 2000) h. 25.

²⁰ Ibid.

Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembahasan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, adalah dasar untuk kabinet Ampera yang terbentuk 25 Juli 1966 melakukan pembentukan dewan stabilitas ekonomi pada tanggal 11 Agustus 1966. Kemudian dijabarkan melalui peraturan 3 Oktober 1966 dengan diikuti paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi (Paket 10 Februari dan 28 Juli 1967).

Kondisi pada masa awal Orba perihal utang luar negeri sudah mencapai tiga koma satu (3,1) milyar dollar AS, dan mulai jatuh tempo pada tahun 1967 sebesar 727,7 juta dollar AS, sedangkan ekspor hanya sebesar 485 juta dollar AS. Oleh karena itu pada tanggal 8 Juni 1967 Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) direstrukturisasi. Sehingga dalam realitanya, perencanaan pembangunan nasional oleh Orba selalu membela pengusaha besar khususnya konglomerat, walaupun tidak dipungkiri juga bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dari masa Orla. Dalam pertumbuhan ekonomi pertanian saja, Bungaran Saragih mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pertanian rata-rata empat persen (4 %) per tahun.²¹ Tetapi harus diakui juga bahwa kondisi ekonomi Orba melahirkan pemaksaan persatuan nasional yang semu, yang harus dibayar kelompok-kelompok lain untuk kemakmuran dan kesejahteraan kelompok lainnya. Ketidaksamaan ekonomis (*economic inequality*) ternyata berhubungan langsung dengan kesenjangan sosial (*social disparity*), yang kembali berhubungan langsung dengan diskriminasi moral (*moral discrimination*).

²¹ "Reformasi Strategi Pembangunan Indonesia" dalam Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia, h.155.

1.3.4 Kondisi Sosial

Agar dapat melihat kondisi sosial, pertama-tama harus dilihat dari segi perekonomian. Ekonomi menunjukkan keadaan masyarakat secara sosial. Tetapi kondisi sosial masyarakat tidak boleh diukur dengan ukuran perekonomian. Kondisi sosial lebih ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap lingkungan dan interaksi yang saling menghargai dan menjunjung tinggi penghormatan kepada sesama.

Selama Orba, perekonomian mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan masa Orla. Bersamaan dengan kondisi kemajuan tersebut, ketimpangan sosial juga meningkat. Kebijakan hanya dapat dinikmati oleh segolongan atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa (baca: keluarga Cendana). Sedangkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses dengan penguasa, kurang atau sedikit memperoleh manfaat dan keuntungan. Lebih parah, ada masyarakat yang dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Sebagai contoh mengenai kehadiran Badan Pengelola dan Penyangga Cengkeh (BPPC) yang diciptakan oleh Tommy Soeharto untuk menangani cengkeh dan pendistribusiannya yang merugikan petani cengkeh itu sendiri. Harga beli di masyarakat murah, sementara BPPC menjual ke Pabrik rokok dengan harga tinggi. Kehadiran BPPC merontokkan petani cengkeh di Sulawesi Utara dan Sumatera. Monopoli cengkeh oleh BPPC merugikan masyarakat sehingga terjadi pemiskinan terhadap warga negara.

Menurut Dawam Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Tadjuddin, mengatakan bahwa kondisi sosial memprihatinkan ketika industri tradisional tekstil gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan industri modern.²² Diperkirakan antara tahun 1969

²² Tadjuddin Noer Effendi, *Pembangunan, Krisis Dan Arah Reformasi* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2000) h. 167.

sampai dengan tahun 1970 jumlah tekstil tradisional sekitar 324 ribu perusahaan. Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1977 hanya tersisa enam puluh ribu perusahaan. Berarti enam puluh persen (60 %) tidak dapat beroperasi karena tidak mampu bersaing dengan industri modern. Kehancuran industri kecil/tradisional yang bangkrut secara otomatis menambah tenaga kerja yang tidak terpakai dan kesempatan berusaha semakin sulit bagi pengusaha-pengusaha tradisional. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Orba seperti di atas, jelas-jelas membuat kesenjangan sosial.

Kebijakan lain yaitu ketika pada tahun 1987 (Pelita III) keluar kebijakan untuk membangun industri kecil dan rumah tangga, dengan menyediakan fasilitas kredit misalnya: Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Pedesaan (Kupedes), dan lain-lain. Tanpa disadari, penyediaan fasilitas kredit tersebut justru memperlebar jurang kesenjangan sosial. Tadjuddin mengatakan bahwa hampir delapan puluh persen (80 %) program kredit tersebut justru dinikmati oleh pengusaha besar, sisanya sebesar dua puluh persen (20 %) untuk pengusaha lemah.²³ Adanya kesenjangan sosial ini secara *de facto* diakui ketika pengusaha kuat (baca: konglomerat) membuat kesepakatan di Jimbaran Bali untuk membantu pengusaha lemah.²⁴ Kesenjangan sosial semakin terasa mengental dengan munculnya *monopoli* dan *oligopoli*, sehingga memperkecil akses usaha kecil untuk mengembangkan usaha. Hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat.²⁵

Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi, mulai dari pabrikasi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transportasi,

²³ Ibid.

²⁴ ibid.

²⁵ bd. dengan pasal 33 UUD '45

perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan dan media komunikasi. Kesenjangan sosial tersebut berimplikasi pada terganggunya pertumbuhan ekonomi rakyat dan menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses *marjinalisasi*.

Kebijakan penataan lahan turut juga menstimulir kesenjangan sosial. Penerapan kebijakan penataan lahan dan tata ruang diwarnai oleh kuatnya kepentingan-kepentingan pengusaha untuk “pembebasan-pembebasan” tanah rakyat dengan alasan untuk pembangunan. Sebagaimana diteliti oleh Suhendar (1994) dalam Tadjuddin Noer Effendi dikatakan bahwa:

‘Kooptasi tanah-tanah: terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata, telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, infrastruktur ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrat membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan lahan untuk kepentingan argoindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas dijadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk.’²⁶

Dari penelitian Suhendar tersebut jelas terlihat situasi yang membuat nasib rakyat memburuk, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dampaknya secara nyata yaitu terjadi *marjinalisasi* dan pemiskinan masyarakat baik di kota maupun di desa dengan bertamengkan pembangunan. Padahal tanah yang diambil dari masyarakat tersebut belum tentu memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Berikut ini data-data dari Suhendar (1994) perihal dampak dari pembebasan-pembebasan tanah, dalam Tadjuddin:

‘Selama kurun waktu 1988-1991, jumlah petani di Jawa Barat yang tergusur akibat tanah mereka dialihfungsikan untuk industri 13.600 petani dengan luas lahan 11 ribu hektar. Banyak petani yang tergusur industri terpaksa kehilangan mata pencaharian. Pada gilirannya, kehidupan masyarakat yang tergusur dalam

²⁶ *ibid.*, h. 170.

kondisi tidak menentu serta diliputi dengan ketidakpastian. Memang masyarakat mendapat ganti rugi, tetapi harga tanah ditetapkan tanpa melalui kesepakatan dengan masyarakat. Tidak jarang masyarakat dipermainkan dan ditipu oleh spekulasi dan calo tanah.²⁷

Dari data-data Suhendar tersebut terlihat jelas faktor yang mengkondisikan rakyat dalam kemiskinan. Tindakan sewenang-wenang yang mengatasnamakan pembangunan mempertajam konflik sosial. Sehingga pemiskinan yang dilakukan pada masa Orba menjadi faktor utama timbulnya kesenjangan sosial. Secara sosial masyarakat menderita oleh sistem yang menguntungkan pengusaha. Implikasinya, ribuan masyarakat yang secara sosial menderita, dendam kepada penguasa (baca: pemerintah) dan konglomerat. Sehingga konflik sosial dan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat, gampang menyulut ataupun disulut sehingga menimbulkan aksi-aksi yang tidak manusiawi, misalnya peristiwa penjarahan dan pembakaran toko-toko etnis Cina yang merebak di berbagai daerah.

Intervensi penguasa dalam hak-hak adat atas tanah ulayat, sehingga pengusaha diuntungkan berdampak pada kerugian masyarakat. Hutan dieksploitasi berbekal aturan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) secara formal adalah tindakan “menganggangi” adat dan ulayat. Suku Dayak di Kalimantan mengalaminya. Orang Dayak yang punya hutan, tetapi secara formal “konglomerat” kayu yang dimakmurkan. Konsesi hak pakai yang dimiliki pengusaha-pengusaha kayu ternyata memarjinalkan suku Dayak. Wajar apabila selama rezim Orba berkuasa, mereka memendam kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Tetapi luapan amarah mereka arahkan pada posisi yang salah yaitu pada masyarakat Madura yang juga termarjinalkan dari Pulau Jawa. Apapun fenomenanya, yang jelas kondisi

²⁷ Ibid.

sosial memprihatinkan. Kesenjangan sosial melahirkan bentuk-bentuk konflik sosial yang sukar dihindarkan.

1.3.5 Kondisi Budaya

Krisis budaya terjadi ketika budaya Indonesia tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Budaya tumbuh berkembang dari atas ke bawah, diikuti pula oleh pertumbuhan demokrasi sebagai produk dari kebutuhan internal dari penguasa ke rakyat. Sehingga di tengah krisis budaya, individu-individu gampang dihanyutkan isu, rumor dan gosip, bahkan gampang diarahkan untuk melakukan aneka tindakan massa yang destruktif.

Menurut Limas Sutanto, krisis budaya ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, masyarakat belum memiliki kesiapan dan kematangan untuk berdemokrasi. *Kedua*, munculnya budaya baru dalam bentuk intervensi nilai-nilai dari aras atas (pemerintah) ke semua lini kehidupan masyarakat. *Ketiga*, pertumbuhan demokrasi yang tidak sehat. Untuk kepentingan politik pendidikan demokrasi di masyarakat terjadi pengabaian kultur masyarakat.²⁸

1.3.6 Kondisi Pertahanan Keamanan (Hankam)

Pertahanan Keamanan NKRI menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diimplementasikan dalam bentuk Rakyat Terlatih (Ratih) dan Rakyat Terorganisir yang secara definitif adalah ABRI (baca: TNI dan Polri). Secara esensial seluruh warga negara memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan NKRI.

²⁸ "Krisis Budaya" dalam Reformasi kehidupan Bernegara, h. 19.

Dalam Pasal 30 UUD '45 tertera tanggung jawab tersebut.²⁹ Kondisi Hankam mengalami titik krisis ketika munculnya gangguan-gangguan di NKRI, yaitu: *Pertama*, merebak pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah: Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya yang tidak kunjung padam. *Kedua*, ketika Timor-Timur lepas dari integrasi NKRI. *Ketiga*, merebak kerusuhan-kerusuhan. Dan yang *keempat* adalah maraknya demonstrasi-demonstrasi, baik yang berlangsung secara murni dan aspiratif maupun yang kurang murni ataupun yang hanya karena dibayar.

Pola kemanunggalan ABRI dan rakyat salah satunya diwujudkan dalam bentuk Abri Masuk Desa (AMD) dengan program-program pembangunannya. Tetapi AMD dirasakan sebagai bentuk kegiatan yang kurang efektif dan cenderung untuk menghabiskan anggaran saja. Di beberapa daerah yang sudah sentimen dengan pemerintah pusat, misalnya Aceh program AMD dirasakan sebagai kerja paksa yang mirip dengan masa kolonial.

Pendekatan Hankam dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sudah positif, tetapi kurang bergema ketika terjadi diskriminatif kepada etnis tertentu dalam rekrutmen Militer Sukarela (Milsuk) sehingga terjadi pelanggaran oleh pemerintah Orba terhadap pasal 30 UUD '45. Dalam penerapannya kesamaan hak dan kewajiban atas pembelaan negara masih diskriminatif.

Model Hankam yang menitik beratkan TNI/Polri sebagai stabilisator dan dinamisator berimplikasi pada perambahan "kekaryaan" TNI/Polri ke segala sektor pemerintahan. Daerah-daerah sipil dibagi-bagi dalam area daerah militer. Bahkan ada beberapa wilayah baik kabupaten/kotamadya maupun provinsi yang masuk dalam

²⁹ bd. Pasal 10 UUD '45.

kualifikasi tertentu, sehingga mengharuskan “penguasanya” harus dari lingkungan TNI/Polri. Ironis memang tapi itulah yang terjadi pada masa Orba, karena salah satu ciri kepemimpinan Soeharto adalah militeristis.

Kondisi pertahanan sangatlah rapuh. Hal ini dibuktikan ketika maraknya kapal-kapal asing yang ilegal beroperasi di perairan NKRI dan semasa bergolak jajak pendapat di Timor-Timur, pesawat-pesawat asing yang tidak melalui prosedur berseliweran di wilayah udara NKRI. Ironisnya tidak ada tindakan yang bisa diambil kecuali memberi komentar kepada pers yang mengatakan bahwa persenjataan kita tidak mampu memantau. Menurut Dr. Sri Bintang Pamungkas, keterlambatan merespon karena persenjataan ketinggalan jaman dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak handal.³⁰

Dalam tugas-tugas keamanan tugas Kepolisian sering diambil alih TNI. Hal yang demikian terjadi karena Polri berada di bawah ABRI. Pola keamanan dengan model Kantibmas positif karena mengedepankan lini masyarakat dalam keamanan, tetapi menjadi negatif ketika aparat kurang terampil dalam tugasnya sehingga dalam penanganan kasus-kasus sering diwarnai dengan kekerasan.³¹ Perihal kesiapan TNI/Polri dalam menangani Hankamnas, Wiranto mengatakan:

Dalam situasi politik seperti dewasa ini, walaupun sejauh mungkin bersikap persuasif dan preventif tetapi setidaknya ada dua masalah besar yang menjadi prioritas tindakan represif yaitu terhadap setiap sikap yang menjurus kepada usaha menghasut massa untuk mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta sikap yang mengancam keselamatan negara.³²

³⁰ Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 175, 176.

³¹ beberapa oknum Polri terpaksa dipecat karena mengakibatkan tahanan meninggal dunia dan di Polda Metro Jaya sendiri tujuh orang dipecat karena melakukan berbagai-bagai pelanggaran. Suara Pembaruan, Selasa 26-06-2001, h. 20.

³² Wiranto “Reformasi Keamanan Dan Ketahanan Bangsa” dalam KAHMI, Reformasi Dan Civil Society (editorial) (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 2000) h.213.

Dari pendapat Wiranto di atas, ada dua masalah besar yang dihadapi TNI/Polri dalam fungsinya sebagai alat negara dalam Hankamnas: *Pertama*, gangguan dari dalam negeri dalam bentuk adanya sikap yang menjurus kepada usaha menghasut massa untuk mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Usaha-usaha ini bisa juga datang dari luar negeri dengan menunggangi LSM-LSM yang bergerak di NKRI. *Kedua*, sikap yang mengancam keselamatan negara. Begitu juga dengan bentuk ancaman ini, bisa datang dari luar dan bisa juga datang dari dalam, misalnya pemberontakan separatis.

Dengan model “militeristis” Soeharto, hal terbesar yang dicapai dalam sentralisasi pengendalian Hankam adalah mengenai Konsensus Nasional. Penjabaran konsensus nasional antara lain dengan adanya fusi kepartaian pada tahun 1973, melegitimasi duduknya wakil-wakil ABRI dalam DPR/MPR tanpa ikut serta dalam Pemilu (100 dari 500 orang anggota DPR) sesuai dengan Undang-Undang Politik tahun 1969. Juga dengan dikeluarkannya UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan dengan titik sentral yakni melegitimasi Dwi-Fungsi ABRI. Sehingga ABRI dalam fungsinya tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara tetapi memungkinkan aktif bergerak dalam percaturan politik.

Dampak militerisme dalam Hankam terlihat ketika muncul suasana yang memperlihatkan bahwa seolah-olah negara selalu dalam keadaan tidak aman. Seolah-olah penuh dengan ancaman, khususnya dari dalam negeri. Oleh karena itu ABRI selalu mencurigai adanya musuh-musuh di dalam negeri. Akhirnya yang menjadi sasaran adalah rakyat. Sehingga rakyat selalu berada dalam ketakutan. Contoh yang paling jelas adalah ketika militer intervensi ke dalam tubuh HKBP mengenai pengangkatan Ephorus. Dalam

kasus HKBP banyak rohaniwan mengalami tekanan dari aparat militer, termasuk penganiayaan dan perlakuan tindakan semena-mena. Dalam militerisme tersebut ABRI selalu memandang bahwa di mana-mana ada musuh. Dr. Sri Bintang Pamungkas mengatakan: “Kritik terhadap pemerintah dan perbedaan pendapat dianggap sebagai gangguan dan ancaman terhadap negara, pemerintah dan pembangunan, dan harus di hadapi dengan tindakan kekerasan secara militer.”³³ Jadi fungsi Hankam yang disandang ABRI pada masa lalu membuat masyarakat ketakutan. Tuduhan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Makar, Ekstrim Kanan, Ekstrim Kiri, dan lain sebagainya yang diarahkan kepada setiap masyarakat yang kritis kepada pemerintah adalah ciri khas pendekatan Hankamnas ABRI pada masa Orba. Oleh karena itu Saurip Kadi mengatakan:

Dalam kedudukan dan peranannya yang sedemikian luas dan berkuasa, ABRI semakin tidak toleran dan responsif terhadap aspirasi rakyat, serta mulai tidak menghargai perbedaan pendapat. ABRI juga cenderung mencurigai setiap golongan masyarakat di luar ABRI yang kritis terhadap ABRI dan pemerintah. Bahkan disertai dengan ancaman melalui berbagai tuduhan, seperti: subversif, ekstrim kiri, ekstrim kanan, kiri baru, anti Pancasila dan UUD 1945, gerakan pengacau keamanan, dan masih banyak lagi yang lainnya.³⁴

Legalitas militerisasi seperti yang dituturkan Kadi di atas membukakan paradigma baru bahwa ternyata sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) telah dimanipulir untuk kepentingan sekelompok orang dalam melanggengkan kekuasaannya selama pemerintahan Orba. Begitu juga dengan pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid yang melakukan tindakan-tindakan intervensi ke dalam tubuh POLRI untuk melanggengkan

³³ lihat Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total, h. 169.

³⁴ Saurip Kadi, TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000) h. 3,4.

kekuasaannya. Padahal esensi pertahanan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam NKRI, yang dijabarkan secara sederhana ketika NKRI diintervensi pihak-pihak asing baik dalam bentuk yang kelihatan maupun lintas batas (darat, laut, bawah laut dan udara) yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi sistem kesenjataan TNI/Polri.³⁵ Oleh karena kondisi Hankam dimiliterisasi sehingga pengacau-pengacau di beberapa daerah wilayah NKRI tidak bisa dituntaskan dalam waktu singkat.

1.4 Tujuan Reformasi

Dalam merumuskan tujuan reformasi, ada dua model pendekatan yang dipakai penulis. *Pertama*, merujuk kepada agenda reformasi secara formal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara –MPR, DPR, Presiden, Menteri dan organ-organ pemerintah lainnya- melalui Undang-Undang (UU) ataupun Ketetapan-Ketetapan (TAP), maupun peraturan-peraturan lainnya. Dan yang *kedua* yaitu melalui opini dan pendapat beberapa pakar yang ahli di bidangnya masing-masing, atau selama bergulirnya reformasi orang-orang yang dirujuk penulis pendapatnya, paling tidak telah memberi kontribusi baik melalui masmedia maupun dalam bentuk buku.

Dari kedua bentuk sumber data tersebut, penulis mengolah dalam segi persamaan, perbedaan bahkan polemik serta kekontradiktifan di antara keduanya. Agar keakuratan dan suasananya lebih hidup, penulis mengetengahkan “*berita up to date*” dari massmedia –koran, majalah, jurnal, dan lain-lain- sebagai pembanding bila diperlukan dan sebagai batu penguji ketika keabsahannya nyata dalam realita masyarakat.

³⁵ Lihat “Pembelaan Negara Republik Indonesia” dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – PPKI (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) h. 396.

Agenda reformasi politik menurut Prof. Dr. Ismail Sunny, LLM., adalah sebagai berikut: *Pertama*, Reformasi Undang-Undang Pemilu. *Kedua*, Reformasi Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. *Ketiga*, Reformasi Undang-Undang Parpol dan Golkar.³⁶ Dasar hukum untuk mengatakan demikian karena ketiga bentuk dari tuntutan tersebut tidak akomodatif dan demokratis, sehingga ada indikasi penafsiran UUD'45 berjalan secara tidak murni dan konsekuen oleh pemerintahan pada masa lampau.³⁷

Senada dengan Prof. Ismail Sunny, LLM., Drs. H. Jusuf Syakir mengatakan bahwa harus ada perubahan dalam beberapa hal tentang peta politik: *Pertama*, pembaharuan Undang-Undang Pemilu. *Kedua*, Pembaharuan Susunan Kedudukan anggota-anggota wakil Rakyat di legislatif. *Ketiga*, pembaharuan Undang-Undang Parpol.³⁸ Perubahan agenda perlu, karena dalam pengamatannya penyelenggaraan Pemilu dan sistem Undang-Undang Parpol yang ada selama pemerintahan Orba, tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya.³⁹

Menurut Prof. Dr. H. Harun Alrasjid, sebelum mengadakan reformasi hukum, politik dan ekonomi dan lain sebagainya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi konstitusi.⁴⁰ Bahkan dia mengusulkan sistem pemilihan –baik pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota legislatif- secara distrik (*single-member constituency*).⁴¹ Pendapat yang demikian sangat beralasan mengingat selama pemerintahan

³⁶ Prof. Dr. Ismail Sunny, LLM., “Agenda Reformasi Politik” dalam KAHMI, Reformasi Dan Civil Society, h. 137.

³⁷ Ibid.

³⁸ Jusuf Syakir “Perubahan Undang-Undang Politik” dalam KAHMI, Reformasi Dan Civil Society, h. 147.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ “Reformasi Konstitusi: Langkah Pertama Menghadapi Tantangan Globalisasi” dalam KAHMI, Reformasi dan Civil Society h. 193.

⁴¹ “Reformasi Undang-Undang Pemilu” dalam KAHMI, Reformasi dan Civil Society, h. 147

Orba, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengambil keputusan politik tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan kemauan politik untuk melakukan pembaruan (reformasi) konstitusi dengan menerapkan pasal 3 UUD '45. Hal yang demikian jelas kontradiksi dengan motto Orba menyikapi UUD '45 yaitu melaksanakan UUD'45 secara murni dan konsekuen.

Menurut A. Muis, reformasi harus diberi makna yang jelas. Ketidakjelasan reformasi yang berjalan sekarang ini terlihat dari reaktualisasi hakikat reformasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang gagal dilaksanakan oleh Orde Baru, yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan individu, keterbukaan demokrasi, penghormatan kepada harkat dan martabat Indonesia (HAM) dan pengakuan terhadap masyarakat Madani (civil society).⁴²

Dari pendapat di atas kenyataan seperti yang diungkapkan oleh A. Muis, dapat dinilai bahwa selama Orba berkuasa, ada beberapa aspek amanat kemerdekaan Republik Indonesia yang gagal diaktualisasikan, yaitu:

1. Kebebasan berbeda pendapat.
2. Kedaulatan rakyat.
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
4. Kemerdekaan individu.
5. Keterbukaan demokrasi
6. Penghormatan kepada harkat dan martabat Indonesia (HAM).
7. Pengakuan terhadap masyarakat Madani (civil society).

⁴² A.Muis "Fenomena Baru Di Usia 53 Tahun Proklamasi Kemerdekaan" dalam Reformasi Kehidupan Bernegara, h. 100.

Aspek yang menonjol dari ketujuh aspek tersebut menurut A. Muis lebih lanjut adalah pada aspek hukum dan keadilan seperti yang tertera dalam pasal 27,28, plus *Preamble*, dan pasal 37 yang tidak dihormati. Contoh: UU No. 5/1985 tentang referendum melabrak pasal 37 UUD '45. Sikap yang demikian memperlihatkan perilaku penguasa yang mengidap arogansi kekuasaan dan berperilaku represif.

Oleh karena itu pendapat yang hampir serupa diungkapkan oleh Tadjuddin Noer Effendi, yang mengatakan bahwa krisis nasional dimulai dari krisis Sumber Daya Manusia (SDM).⁴³ Potret SDM pada masa Orba secara kualitas fisik maupun sosial yang sangat memprihatinkan.⁴⁴ Keprihatinan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Orba yang mengedepankan perencanaan pembangunan (*planned development*) dengan azas trilogi pembangunan.⁴⁵

Menilik latar belakang munculnya reformasi di Indonesia maka satu hal yang harus digaris bawahi yaitu adanya indikasi kegagalan pemerintahan Orba mengemban amanat kemerdekaan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kondisi masyarakat dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam dan hukum masih belum mencerminkan amanat UUD '45.

Titik sentral yang mengemuka dalam pemunculan reformasi yaitu kegagalan Orba. Walaupun tidak bisa dipungkiri beberapa aspek kemajuan yang dicapai, misalnya pemberantasan buta huruf dengan mencanangkan wajib belajar enam tahun pada tahun 1975, kemudian ditindak lanjuti dengan membangun proyek SD Inpres, *tokh* hal-hal prinsipil justru terpasung. Pemasungan hak-hak azasi manusia seperti kebebasan dari

⁴³ Lihat *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*, h.98

⁴⁴ *Ibid.*, h. 211.

⁴⁵ *Ibid.*, h.215.

ketakutan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan lain sebagainya adalah barang yang langka selama pemerintahan Orba. Pemasungan selama tigapuluhdua tahun menjadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap Orba.

Tetapi untuk sampai pada reformasi total seperti yang diharapkan banyak kalangan, belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentu hal ini disebabkan oleh pendefinisian reformasi yang tidak jelas. Siapa mereformasi siapa, dan apa mereformasi apa tidak jelas *juntrungannya*. Ketidakjelasan ini terlihat ketika muncul perilaku *antinomia* yang menyimpang dari tatanan sosial. Banyak warga dalam setiap strata sosial cenderung merasa bebas melanggar hukum. Termasuk ketika Ketua MPR Dr. Amien Rais menghadiri undangan pengukuhan Guru Besar di Universitas Mercubuana Jakarta, mobil dinasya diinjak-injak “oknum” mahasiswa yang tidak bertanggung jawab.⁴⁶ Ini terjadi di kalangan yang menyebut dirinya kalangan “akademisi” yang notabene adalah “oknum” berintelektual tinggi. Tetapi dalam perilaku tidak menggambarkan bahwa “oknum” tadi adalah seorang mahasiswa. Perilakunya hampir sama dengan orang yang tidak pernah “mengecap” bangku sekolahan. Lalu apa sebetulnya makna yang dikandung dan diamanatkan reformasi itu sendiri ? Kalau reformasi ditafsirkan dengan kebebasan “barbar” dan “anarkis” lebih bagus tidak usah ada reformasi. Mungkin masih lebih bagus dan lebih enak hidup di jaman Orba. Kalau reformasi dengan jalan keberingasan yang dilakukan, ada keyakinan bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih duaratus juta jiwa akan lebih setuju dengan *status quo* (baca: yang menginginkan kepemimpinan Orba). Lalu pertanyaan selanjutnya menyangkut masyarakat *marginal* yang seringkali terpinggirkan, bagaimana kelakuan mereka ? Secara *diskursus*, ada

⁴⁶ dalam judul “Mahasiswa Kurang Pahami Arti Intelektual,” Suara Pembaruan, 19-06-2001, h.11.

kemungkinan juga bahwa dalam moral, masyarakat *marginal* yang sering terpinggirkan masih lebih baik dari oknum mahasiswa tadi.

Tetapi secara *diskursus* juga, bisa jadi apa yang dilakukan “oknum” mahasiswa tersebut terjadi karena ketidaktentuannya tentang reformasi. Sehingga reformasi ditafsir dari sudut pandang kemahasiswaannya yang cenderung masih *ugal-ugalan*. Apapun yang menjadi *diskursus*, yang jelas kondisi yang demikian memperlihatkan ketidaktuntuan “masyarakat” akan reformasi itu sendiri.

Dikalangan aparaturnegara juga berlaku hal yang serupa. Tidak mengerti dan tidak tahu tujuan reformasi. Sejak reformasi merebak di mana-mana (1998) sampai ke masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid Presiden NKRI keempat, beberapa pejabat negara tetap melakukan KKN dalam bentuk korupsi. Secara khusus kasus korupsi Bulog yang melibatkan Kepala Bulog, dan seterusnya sampai kepada dugaan korupsi Ginanjar Kartasasmita.

Peralihan pemerintahan kepada B.J. Habibie tetap tidak membawa perubahan apa-apa. Bahkan salah satu provinsi NKRI harus lepas dari NKRI karena kurang hati-hatian Presiden B.J. Habibie dalam memberi opsi. Padahal selama ini pemerintahan Orba sangat gigih memperjuangkan integrasi Timor-Timur sebagai bagian integral NKRI.

Dalam keadaan seperti itu, seolah-olah gerakan reformasi itu sendiri sepertinya tidak mampu berbuat banyak untuk mewujudkan Indonesia Baru yang diidam-idamkan. Di bawah kepemimpinan GusDur-Megawati, keadaan bukan bertambah baik. Meminjam istilah Dr. Sri Bintang Pamungkas, pemerintahan GusDur-Megawati tidak lebih baik dari pendahulunya. Alasannya cukup sederhana, GusDur-Megawati tidak memiliki konsep visi-misi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Keadaan yang demikian semakin memburuk ketika anggota kabinet silih berganti –baik karena diganti secara paksa, secara tidak dipaksa, ataupun setengah dipaksa ataupun yang dengan sukarela mengundurkan diri- pada pemerintahan GusDur-Megawati. Sekalipun demikian, perbaikan yang diharapkan tidak kunjung tiba. Ekonomi tetap tidak membaik. Nilai tukar Rupiah tetap bertengger dikisaran sepuluh ribu rupiah untuk satu dollar Amerika. Politik *gonjang-ganjing*, hukum tidak bergaung secara positif, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, terkesan hanya formalitas belaka. Tokoh intelektual di balik peristiwa itu tetap tidak terjaring. “Serdadu” yang diajukan hanyalah “tumbal” disain pejabat tinggi di kemiliteran. Pengadilannya sendiri menjadi dilema ketika “para terdakwa” dibela pengacara yang cukup *beken*, sehingga ada kemungkinan terdakwa *kroco* pun akan lolos juga. Di bidang Hankam, kerusuhan separatis merebak di berbagai daerah di NKRI: Aceh, Irian Jaya, Maluku, Palangka Raya dan lain-lain yang skalanya lebih kecil misalnya Poso dan peristiwa Pasuruan.

Tujuan reformasi seperti yang dikemukakan oleh Dr. Sri Bintang Pamungkas adalah untuk mencapai dan menuju Indonesia Baru. Caranya lewat reformasi total. Dengan tujuh pilar reformasi total diharapkan NKRI dapat menuju Indonesia Baru. Menurutnya lebih lanjut bahwa “kehancuran negara” yang terjadi sekarang ini bukan karena akibat reformasi. Tetapi semua bentuk kehancuran tersebut terjadi karena reformasi belum pernah dimulai. Konsep-konsep yang demikian dapat kita terima mengingat bahwa dialah orang yang pertama secara terbuka mengatakan oposan terhadap rezim Soeharto yang diktator.

Di tengah-tengah suasana pencarian berbagai “model,” “pengajuan berbagai gagasan” tujuan reformasi, penulis mengetengahkan dalam tulisan ini gagasan “reformasi

total *ala* Bintang.” Bukan maksud penulis menilai cara berpikir dan gagasan dari tokoh-tokoh yang lain tidak baik dan bagus, sehingga tidak *memformulakannya* dalam penulisan ini. Sama sekali tidak seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa penulis mengetengahkannya: *Pertama*, latar belakang ketokohan Dr. Sri Bintang Pamungkas sendiri. Dia adalah orang “pertama” yang berani memproklamirkan dirinya sebagai oposan terhadap *rezim diktatorial* ⁴⁷Socharto. *Kedua*, konsep yang didengungkan adalah konsep yang nyata. Konsepnya jelas –arah dan tujuan reformasi serta pokok pikirannya jelas, sehingga tidak mengambang. *Ketiga*, kesiapannya menjajal konsep disertai dengan kesiapannya menjalankan konsepnya dan siap memimpin.

Ketiga latar belakang tersebut membuat penulis mengetengahkan penulisan lebih menonjol mereferensi konsepnya, tetapi untuk membandingkan dan merujuk inti pembahasan tetap juga mempergunakan pokok-pokok pikiran lain selain Dr. Sri Bintang Pamungkas. Tetapi secara umum, dapat diakui bahwa tujuan reformasi yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dalam Indonesia Baru. Gagasan Dr. Sri Bintang Pamungkas mengenai reformasi total adalah sebagai berikut:

1. Lembaga kepresidenan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat.
2. Otonomi penuh dan luas pada tiap-tiap Provinsi dalam kerangka negara kesatuan.
3. Penyusunan kembali struktur dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat dua kamar.
4. Penghapusan Dwi-Fungsi ABRI serta penyusunan kembali struktur dan fungsi pertahanan negara dan keamanan umum.
5. Hukum, Mahkamah Agung dan kemandirian kekuasaan peradilan.

⁴⁷ Istilah yang dipergunakan oleh Wiraatmadinata dalam majalah Gamma, Nomor 14 Tahun III tanggal 23-29 Mei 2001.

6. Hak-Hak Azasi Manusia serta hak-hak dasar rakyat dan warga negara dalam konstitusi.
7. Perubahan UUD 1945 serta kewajiban pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Untuk mewujudkan agenda-agenda tersebut dibutuhkan figur seorang pemimpin yang memiliki “kharisma” dalam mewujudkannya. Kepemimpinan nasional yang relevan mutlak diperlukan, seperti yang dikatakan Ir. Akbar Tanjung:

Kepemimpinan nasional yang diperlukan adalah kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa ini untuk melakukan *pembaruan* dan *perubahan* untuk *keluar dari krisis*, sekaligus siap memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang sangat ketat di segala bidang kehidupan tersebut.⁴⁹

Tiga kata yang penting dari pernyataan Akbar Tanjung tersebut, yaitu melakukan pembaruan, perubahan dan keluar dari krisis. Menyiratkan bahwa selaku ketua DPR Akbar Tanjung telah mengakui bahwa bangsa Indonesia mengalami krisis. Pengakuan ini penting untuk semakin cepat memulihkan krisis itu sendiri. Secara politis juga pengakuan ini penting mengingat Akbar Tanjung adalah tokoh yang berperanan dalam Golkar, Orba dan pernah menjadi menteri semasa pemerintahan Soeharto. Secara positif, dengan adanya pengakuan berarti pemimpin di aras pusat semakin menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin-pemimpin negara.

Kebutuhan figur seorang pemimpin nasional yang memiliki *kharisma* seperti Ir. Soekarno Presiden NKRI pertama, lahir dari realita tuntutan pembaharuan itu sendiri. Sebuah pembaruan atau perubahan, tidak mungkin dilakukan dalam suatu kevakuman

⁴⁸ Tujuh Pokok Reformasi Total untuk mencapai Indonesia Baru, dibahas dalam satu buku yaitu Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total (Jakarta: Erlangga, 2001)

⁴⁹ Ir. Akbar Tanjung “Visi Indonesia Memasuki Millenium III: Perspektif Kepemimpinan Nasional” dalam KAHMI, Reformasi dan Civil Society h.173.

kepemimpinan. Tetapi sampai saat ini menurut Dr. Sri Bintang Pamungkas, kepemimpinan yang “ideal” bagi masyarakat, bangsa dan negara belum ada. Pemimpin-pemimpin terdahulu –minus Soekarno- sampai dengan kepemimpinan GusDur-Megawati tidak memiliki idealisme visi-misi.⁵⁰

Oleh karena itu kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada beberapa sikap yaitu: *Pertama*, memiliki pengertian akan hakekat perubahan jaman dalam dimensi global. *Kedua*, adanya pengertian tentang budaya sendiri (Indonesia) sehingga dapat mengerti lebih tepat titik singgung antara pola budaya nasional dengan pola budaya dunia. *Ketiga*, akomodasi positif kepada perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah suatu kemestian.⁵¹

Poin kepemimpinan di atas diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang yang akan naik menjadi Presiden NKRI kelima. Tetapi di samping Presiden, pemimpin-pemimpin yang lain –MPR, lembaga tinggi negara, serta pemerintah- juga diharapkan memilikinya. Dengan demikian segenap rakyat Indonesia harus tahu bahwa yang dihadapi paling utama dari krisis Indonesia –krisis moneter, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain- paling mendasar adalah krisis moral. M.T. Zen mengatakan:

Kita ketahui bahwa sebetulnya bukan krisis moneter tetapi *krisis moral* yang jauh lebih mendasar. Segenap lapisan masyarakat mengalaminya. Mulai dari anak-anak sekolah, tukang becak, tukang opelet, pedagang kaki lima, pemandu wisata, ibu-ibu rumah tangga, pasien rumah sakit, tukang potret, tukang pembuat tahu-tempe, tukang jual koran dan tukang jual kantung plastik. *Poko-poko* seluruh lapisan masyarakat.⁵²

Walaupun krisis ini secara nasional tetapi sedikit sekali orang yang menyadari malapetaka tersebut. Krisis ini menjadi malapetaka karena beberapa hal:

⁵⁰ lihat Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total, h. 11,36,105.

⁵¹ Lihat “Visi Indonesia Memasuki Millenium III: Perspektif Kepemimpinan Nasional” dalam KAHMI, Reformasi dan Civil Society, h. 173.

1. *Dari segi keuangan.* Utang luar negeri membengkak sekurang-kurangnya duaratus milyar dollar. Utang pemerintah limapuluhtiga milyar dollar dalam bentuk jangka panjang dan bunga rendah, selebihnya utang swasta.
2. *Dari segi pertumbuhan ekonomi.* Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh koma dua persen (7,2 %) per tahun, menjadi kontraksi nilai sebesar duabelas persen (12 %) lebih sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus lima persen (-5 %). Implikasinya, ribuan perusahaan gulung tikar, GBHN direvisi, PHK berjumlah kurang lebih duapuluh (20) juta orang. Berikut data-data keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia di antara negara-negara Asia:

<u>Pertumbuhan GDP</u>				<u>Laju Inflasi</u>		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
<i>Negara Industri</i>						
Korea	5.5 %	-0.8 %	4.1 %	4.5 %	10.5 %	4.3 %
Taiwan	6.9 %	5.0 %	5.2 %	1.1 %	4.0 %	2.0 %
Hongkong	5.3 %	3.0 %	4.3 %	6.5 %	4.5 %	4.5 %
Singapore	7.8 %	3.5 %	5.0 %	2.0 %	2.5 %	2.1 %
<i>Negara Berkembang</i>						
China	8.8 %	7.0 %		1.5 %	2.0 %	
Indonesia	5.0 %	-5.0 %		6.6 %	44.3 %	
Malaysia	7.8 %	2.5 %		2.7 %	7.5 %	
Philippines	5.1 %	2.5 %		5.1 %	8.0 %	
Thailand	-0.4 %	-3.1 %		5.6 %	11.6 %	
Vietnam	7.5 %	5.0 %		3.1 %	7.0 %	

Sumber: Kompas, Rabu 15-04-1998, h.9.

⁵² M.T. Zen "Menuju Masyarakat Terbuka" dalam Reformasi Kehidupan Bernegara, h. 64.

3. *Dari segi kemiskinan.* Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan akan mencapai seratusjuta (100 juta) orang (bd. dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 202 juta orang).
4. *Dari segi dunia pendidikan.* Murid sekolah yang putus sekolah belum pernah didaftar, sehingga pengelolaan dan penanggulangannya susah dilakukan.
5. *Dari segi kredibilitas internasional.* Kredibilitas Indonesia di tengah interaksi internasional menjadi negatif. Bangsa Indonesia dipandang sama miskinnya dengan negara Somalia di Afrika.

Krisis yang terjadi selama ini merupakan hasil akumulasi dari *mismanagement* (salah urus) dan penyelewengan besar-besaran selama tigapuluhdua tahun. Sumber petaka tersebut terjadi karena adanya erosi moralitas sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia dalam realitanya selalu berjuang mendapatkan kemerdekaan, baik dari penjajahan Belanda dan Jepang, maupun kemerdekaan dari rezim Orla, Orba dan berjuang dari “pemiskinan” dan “krisis” di jaman Orde Reformasi, dan entah kemerdekaan apa lagi yang harus diperjuangkan untuk masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal yang jelas kemerdekaan sepenuhnya yang dicitakan seperti termaktub dalam tujuan kemerdekaan NKRI belum terwujud. Usaha untuk itu selalu terbentur pada pemusatan kekuasaan di tangan satu orang, baik pada jaman Orla maupun pada jaman Orba. Dan untuk jaman reformasi ini terbentur pada berbagai macam kekuasaan yang tumpang tindih dan tidak beraturan.

Oleh karena itu orde reformasi dalam mewujudkan tujuan yaitu Indonesia Baru, perlu menghindari kesalahan-kesalahan Orde sebelumnya. Hal-hal yang perlu dihindari:

1. Pemusatan kekuasaan tanpa batas dan tanpa kotrol ke tangan satu orang.

2. Penumpasan hak-hak rakyat secara terus menerus, misalnya: UU Parpol, UU Pemilu, UU Pers/PP SIUP; dan lain sebagainya yang merampas hak-hak rakyat dalam menentukan hak kebebasan berkumpul dan berserikat.
3. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), misalnya: monopoli cengkeh (kasus BPPC yang melibatkan Tommy Suharto), monopoli tepung terigu, monopoli jual beli minyak, jual beli kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Termasuk juga monopoli “kebenaran” lewat BP-7 dengan P4.
4. Mengkerdilkan manusia Indonesia dengan terjadinya budaya “mohon petunjuk.” Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pengecut dan penakut, termasuk cerdik pandai dengan segudang gelar akademis yang dimilikinya pada masa Orba.
5. Kesetiaan bukan lagi kepada negara dan konsstitusi, melainkan kepada “keluarga” penguasa. Kroni-kroni penguasa menggurita dan saling berlomba menggerogoti kekayaan NKRI.

Maka dapat dikatakan seluruh bangsa Indonesia ikut bersalah pada masa lalu sehingga terjadi “pemiskinan.” Kemungkinan pengecualian hanya untuk orang Asmat di Irian Jaya, orang Badui di Jawa Barat dan orang Kubu di Sumatera. Banyak orang yang pandai pada masa Orba, tetapi tidak menyuarakan kebobrokan yang terjadi. Di antara seribu orang yang hadir pada sidang paripurna MPR tahun 1992 hanya Aberson Marle Sihaloho dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berani menginterupsi sidang. Oleh karena itu menurut perkiraan banyak pihak, untuk benar-benar keluar dari kemelut paling cepat dicapai dalam tahun 2003.⁵³ Oleh karena itu betapa besar dosa orang-orang yang menyebabkan petaka bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Dalam kekristenan dosa

⁵³ Lihat M. T. Zen “Menuju Masyarakat Terbuka” dalam Reformasi kehidupan Bernegara, h. 66.

adalah kehidupan yang mendatangkan maut, yang pada akhirnya berujung pada penderitaan dan kesusahan (Rom 6:23). Maka, cita-cita yang hendak diwujudkan reformasi adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan beradab adalah lewat masyarakat terbuka. Masyarakat yang terbuka yang didambakan itulah Indonesia Baru dengan manusianya yang baru.

1.5 Rangkuman

Tujuan reformasi yang dipahami di Indonesia adalah kelepasan dari kungkungan rezim Orba. Tiga opsi menyikapi reformasi: *Pertama*, kubu yang pro status quo. *Kedua*, kubu yang bertolak belakang dengan status quo yang sering disebut kubu ekstrim. Dan yang *ketiga* adalah kubu moderat. Dalam pelaksanaannya ketiga kubu saling tarik menarik dalam percaturan politik.

Rezim Orba dianggap gagal untuk menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu masyarakat makmur, adil dan beradab.

Reformasi adalah kata sakti di Indonesia saat ini. Segala sesuatu dipandang dari sudut reformasi. Tetapi esensi dari reformasi itu sendiri tidak dipahami. Sehingga reformasi Indonesia untuk sampai pada tujuan Indonesia Baru harus memakan waktu yang agak lama.